

**PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH  
LUAR BIASA (SLB)****Renyta Syifa Angela, Azka Alvira Maulida**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*e-mail* : renytasyifa@students.unnes.ac.id, azkaalviravira@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis mengenai faktor penyebab putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, serta program dan peran dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah dalam meminimalisir angka putus sekolah di sekolah luar biasa (SLB). Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode empiris deskriptif yakni penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan di artikel ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Secara khusus faktor-faktor yang menyebabkan angka putus sekolah di SLB diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor jarak, faktor orang tua dan faktor lingkungan. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan pemangku kebijakan Pendidikan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan kebijakannya Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk membuat, melaksanakan, serta memantau pelaksanaan Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program Pendidikan. Dalam upayanya meminimalisir angka putus sekolah di SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa program yaitu program pembangunan unit sekolah baru, bantuan pip dan bsm, dan meningkatkan kualitas pendidikan di SLB.

***Kata Kunci : Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Putus sekolah, Sekolah Luar Biasa (SLB)***

**ABSTRACT**

The purpose of writing this article is to analyse the factors that cause dropout for children with special needs, as well as the programs and role of the education and culture office of Central Java province in minimising dropout rates in special schools (SLB) The research method used in this article is descriptive empirical method, namely research by going directly to the field and then analysing the results of the research. The data sources used in this article consist of primary data sources and secondary data sources. In particular, the factors that cause dropout rates in slb include economic factors, distance factors, parental factors and environmental factors. The Central Java Provincial Education and Culture Office is the education

policy maker in the Central Java Province area. In carrying out its policy, the Central Java Provincial Education and Culture Office has the authority to create, implement and monitor the implementation of education. The Central Java Provincial Education and Culture Office also plays an important role in the implementation of various education and culture programmes. The Central Java Provincial Office of Education and Culture in its efforts to minimise dropout rates in slb has several programmes, namely the construction of new school units, pip and bsm assistance, and improving the quality of education in SLB.

**Keywords :** *Education and Culture Office Programmes, Dropout, Special Schools (SLB)*

## PENDAHULUAN

Setiap individu diseluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan. Perananan Pendidikan sangatlah penting dalam kemajuan suatu bangsa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil kajian yang menyatakan bahwa berkembang pesat nya suatu bangsa disebabkan oleh pendidikan. Kemajuan suatu bangsa memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendidikan yang merupakan tempat peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan yang merata, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan manusia merupakan Pendidikan yang mengembangkan serta memfasilitasi perubahan Masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pendidikan adalah suatu aspek dari kehidupan manusia yang sangat mendasar mulai dari lahir sampai dengan mati (long life education). Pendidikan berdasarkan konsepnya adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh serta terancang dengan sempurna guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan Masyarakat Indonesia seluruhnya untuk menciptakan Masyarakat yang cerdas, bermutu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan,

keterampilan, nilai, dan seni. Hal ini adalah Upaya yang terstruktur untuk mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di Indonesia Pendidikan merupakan salah satu sarana yang diharapkan dapat menjadikan Indonesia kedepannya lebih berkembang dan maju. Sejalan dengan berdasarkan UUD 1945 pasal 31 dan ayat 1 menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan Pendidikan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki, Perempuan, dewasa, anak-anak, maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan. Berkaitan dengan kesetaraan hak untuk anak berkebutuhan khusus, pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyediakan Pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pasal 15 disebutkan mengenai Pendidikan khusus, selanjutnya pada pasal 32 menyatakan bahwasanya Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>1</sup>Di Indonesia Pendidikan khusus dilaksanakan secara inklusif atau dengan satuan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan khusus di tingkat dasar dan menengah. Tujuan dari Pendidikan khusus adalah agar anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.

Pada kenyataannya, Pendidikan khusus di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri dan Sebagian besar hanya berpusat di daerah-daerah tertentu. Hal ini menjadi salah satu dari penyebab terjadinya angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia diperkirakan anak yang berkebutuhan khusus dengan kisaran usia 5-19 tahun adalah 3,3 persen. Apabila dihitung jumlah anak diusia tersebut adalah 66.6 juta jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus di rentang usia 5-19 di Indonesia berkisar pada angka 2.197.883 jiwa.<sup>2</sup> Selanjutnya anak yang berkebutuhan khusus dan mengikuti Pendidikan inklusi adalah 269.398 jiwa dengan persentase 12.26 persen dari keseluruhan jumlah anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya angka putus sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih banyak dan hal ini sangatlah memprihatinkan.

Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana peserta didik menghentikan Pendidikannya sebelum menyelesaikan tingkat Pendidikan yang telah ditentukan, sehingga peserta didik tidak dapat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena kurangnya kesadaran Masyarakat akan Pendidikan utamanya bagi anak berkebutuhan khusus. Fenomena putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai faktor mulai dari keterbatasan biaya, rasa malu bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jauhnya tempat

sekolah luar biasa / sekolah Pendidikan khusus serta beberapa faktor lainnya. Menyikapi fenomena ini dibutuhkan peran serta program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku pembina pendidikan khusus di Jawa Tengah untuk meminimalisir angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Meminimalisir Angka Putus Sekolah Di Sekolah luar biasa (SLB)”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada artikel ini adalah jenis penelitian empiris deskriptif. Tujuan menggunakan jenis penelitian empiris deskriptif adalah untuk mendeskripsikan peran dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisir angka putus sekolah di SLB. Metode empiris merupakan metode penelitian yang terjun langsung kelapangan dengan objeknya adalah peristiwa atau gejala-gejala dalam Masyarakat atau suatu Lembaga ataupun negara yang sifatnya langsung bukan dari studi Pustaka. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan atau menganalisa hasil dari suatu penelitian

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.<sup>3</sup> Data primer diperoleh langsung berdasarkan wawancara, observasi, ataupun laporan dokumen yang tidak resmi dan selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>4</sup> Data primer pada penelitian ini bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>2</sup> Maharani, Windi Puan, Thesis. “Upaya Pengurangan Angka Putus Sekolah Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Walinagari di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”.(IPDN, 2023)

<sup>3</sup> Bagong Suyanton, dan Sutinah. 2007. “*Metode Penelitian Sosial*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal : 55

<sup>4</sup> Zainuddin, Ali. 2011.”*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 175

Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada bidang pembinaan pendidikan khusus. Selanjutnya data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian baik dalam bentuk artikel, skripsi, thesis, laporan dan disertasi.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dan internet.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Putus Sekolah**

Putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jawa Tengah sering terjadi terutama ketika ABK naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berdasarkan wawancara dengan bidang pembinaan pendidikan khusus Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah jumlah Sekolah Luar Biasa tahun 2022/2023 berjumlah 188 dengan jumlah peserta didik keseluruhan Sekolah Luar Biasa berjumlah 20.077, jika dijabarkan jumlah peserta didik pada Sekolah Luar Biasa negeri berjumlah 9.957 sedangkan jumlah peserta didik pada Sekolah Luar Biasa swasta berjumlah 10.102. Pelbagai faktor yang menjadi penyebab anak berkebutuhan khusus putus sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, dan keluarga/masyarakat. Hal-hal yang menjadi penyebab angka putus sekolah pada anak-anak berkebutuhan khusus:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Persoalan uang atau ekonomi menjadi hal yang sering ditemukan mengapa seorang anak untuk tidak mengenyam atau melanjutkan Pendidikan, Yang dimaksud faktor ekonomi disini adalah ketidakmampuan keluarga dari peserta didik untuk membiayai keseluruhan kebutuhan selama masa tempuh Pendidikan pada jenjang tertentu.<sup>6</sup> Perlu diketahui ada beberapa putus sekolah dikarenakan kematian orang tua, maka anak tersebut

putus sekolah dikarenakan tidak adanya pihak orang tua atau pihak yang mau bertanggung jawab dalam membiayai Pendidikan anak tersebut. Selain itu, pendapatan orang tua yang minim sehingga tidak tercukupinya ekonomi, berimbas tingginya aktivitas orang tua dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Pekerjaan bersangkutan dengan pendapatan yang diperoleh maka secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan Pendidikan anak. Biaya menjadi syarat Pendidikan, terutama bagi anak ABK yang seringkali memerlukan biaya lebih banyak dalam proses perkembangannya. Sehingga seringkali kecilnya pendapatan orangtua menjadi menghambat Pendidikan seorang anak.

#### **2. Faktor Jarak**

Jarak dari rumah ke sekolah menjadi faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah, terutama bagi ABK yang mengenyam pendidikan di SLB, hal ini karena jumlah penyebaran SLB yang masih kurang merata. Seringkali jarak tempuh sekolah yang jauh menjadi suatu alasan bagi para orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke jenjang sekolah tertentu. Jarak tempuh yang jauh akan berimbas pada tambahan biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab bagi orang tua, bila orang tua memiliki pendapatan yang minim tentu akan menjadi beban tersendiri. Jarak dari tempat tinggal ke sekolah menimbulkan biaya transportasi dan biaya kesempatan dari waktu tempuh ke sekolah.<sup>7</sup> Tambahan biaya pendidikan ini menjadi pertimbangan orang tua dalam mendaftarkan anaknya ke jenjang pendidikan, terlebih bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang sulit. Jarak tempuh ke sekolah yang jauh menimbulkan tambahan biaya transportasi, sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu akan memilih untuk tidak bersekolah.<sup>8</sup> Banyak juga yang menjadikan

<sup>5</sup> Ibid : 106

<sup>6</sup> Sarfa Wassahua.2016. “Analisis Faktor -Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon”. al- iltizam, Vol. 1 (2): 104.

<sup>7</sup> Robby A.Sirait. 2019. “Pengaruh jarak ke sekolah terhadap angka partisipasi dan putus sekolah SMP di Indonesia”. Jurnal Budget, Vol. 4 (1) : 29.

<sup>8</sup> Op.Cit : 106

jarak tempuh ke sekolah sebagai alasan anak sering bolos karena terbatasnya hal-hal sederhana seperti siapa yang akan mengantar dan menjemput ketika di waktu pulang sekolah anak. Dengan alasan jarak tempuh dan keefektifan waktu menjadi penyebab anak beralasan bolos bahkan tidak mengenyam pendidikan.

### 3. Faktor Orang tua

Keluarga merupakan majelis pembelajaran unggul yang tak kalah penting dalam kehidupan anak terutama yang memiliki kebutuhan khusus, dengan peran dan keberadaan figur orang tua yang memahami dan mengerti kebutuhan anak maka akan membentuk anak dengan moral dan nilai dibanding anak yang tidak mendapat perhatian dari orang tua. Figur orang tua yang cenderung tidak peduli dan tidak peka terhadap kebutuhan anak yang selayaknya dan seharusnya dipenuhi guna terpenuhinya kebutuhan mendasar pendidikan. Maka peran juga pengetahuan orang tua mengenai anak perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna menyelaraskan pola pikir yang beranggapan bahwa sekolah difabel atau sekolah luar biasa adalah sekolah cacat. Pendidikan adalah poin utama yang harus orang tua tanamkan pada anak agar membentuk anak yang berpengetahuan tinggi. Memotivasi anak merupakan peran orang tua yang penting sehingga anak merasa bersemangat untuk berproses pada jenjang pendidikan yang tinggi, namun sebaliknya orang tua tidak memberikan dukungan, maka efek putus sekolah menjadi beban berat dalam diri anak.

### 4. Faktor Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri, lingkungan merupakan faktor yang sangat urgen, bahwasannya lingkungan menjadi alasan yang dapat mempersulit perkembangan pola pikir baik dari segi orang tua maupun anak. Yang dimaksudkan faktor lingkungan disini adalah pemikiran masyarakat

bahwasannya pendidikan tidak penting. Mereka seringkali memiliki pemahaman bahwa tanpa mengenyam pendidikan pun anak-anak mereka hidup layak seperti anak yang bersekolah. Oleh karenanya banyak anak yang memutuskan tidak bersekolah dan dapat hidup dengan layak maka fakta seperti ini dijadikan dasar dalam menentukan masa depan anak.

Faktor lainnya yang menyebabkan putus sekolah adalah cacat, kelainan, IQ yang cenderung rendah, rendah diri, gengsi, dan umur yang melebihi usia sekolah. Sebagian kecil anak yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali disebabkan cacat fisik.<sup>9</sup>

### **Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Meminimalisir angka putus sekolah di SLB**

Pemerintah daerah mempunyai kewenangannya sendiri untuk mengatasi permasalahan Pendidikan di era desentralisasi Pendidikan, berarti dengan adanya desentralisasi Pendidikan maka terjadilah pelimpahan kewenangan dan kekuasaan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusannya sendiri dalam mengatasi masalah Pendidikan<sup>10</sup>. Sehingga pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan memiliki peran yang penting, selain itu pemerintah daerah tidak hanya sebagai pemilik kebijakan namun juga mengontrol tiap-tiap perkembangan yang ada di daerahnya, selanjutnya pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk melayani Masyarakat, menjadi fasilitator/penyedia sarana dan prasarana publik.

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan pemangku kebijakan Pendidikan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan kebijakannya Dinas Pendidikan dan

<sup>9</sup>Ittasaqa Badasyari., 2022. “Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tegal Dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah”. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 (2) : 56

<sup>10</sup> Abdul Halim. 2001. “Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Hal . 15

kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk membuat, melaksanakan, serta memantau pelaksanaan Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memegang peranan penting untuk pelaksanaan berbagai program Pendidikan dan kebudayaan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perencanaan, mengawasi, serta mengusahakan pengorganisasian manajemen layanan pendidikan agar lebih baik dengan pemenuhan sarana prasarana, dan mengembangkan sektor pendidikan dan kebudayaan di Jawa Tengah. Selaras dengan hal itu, Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah menjalankan beberapa program dalam upaya nya untuk meminimalisir angka putus sekolah di SLB di Jawa Tengah.

1. Program Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

Program pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) untuk SLB di Jawa Tengah merupakan salah satu program yang dimiliki oleh kemendikbud dan kemudian diberikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan perannya untuk perencanaan, pengelola dan melaksanakan pembangunan. Pendanaan untuk Pembangunan unit sekolah baru dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat. Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan pelaksanaan program ini yaitu melakukan pengamatan pada daerah yang membutuhkan adanya SLB Negeri, kemudian mengajukan permohonan pada pemerintah pusat berupa bantuan pembangunan USB-SLB dan nantinya pemerintah pusat lah yang akan memutuskan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah hanya memberi usulan sesuai keterbutuhan dan pemerintah pusat yang berhak menentukan. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah juga berperan dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan USB-SLB hal ini juga meliputi proses perizinan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

Program pembangunan Unit sekolah baru berfokus pada daerah-daerah yang belum terdapat SLB Negeri ataupun daerah yang masih minim adanya SLB Negeri, karena di Jawa Tengah dengan banyaknya anak berkebutuhan khusus maka tiap-tiap daerah seharusnya memiliki lebih dari satu SLB baik Swasta maupun Negeri. Program pembangunan USB ini diharapkan mampu meminimalisir angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus terutama bagi mereka yang terkendala karena jarak. Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah tidak memiliki langkah khusus untuk mensosialisasikan program ini kepada Masyarakat, namun hanya dilakukan penyebaran informasi kepada Masyarakat dengan mulut ke mulut. Sehingga dalam hal ini peran guru sangat penting untuk mengajak para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar mau menyekolahkan anak-anak mereka. SLB yang dihasilkan dari program ini merupakan slb negeri sehingga setiap siswa/siswi yang bersekolah tidak dipungut biaya. Selain itu dengan adanya program ini maka keberadaan SLB Negeri akan semakin banyak dan tersebar luas.

2. Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin)

Bantuan pemerintah menjadi salah satu program yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk meminimalisir angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus terutama bagi yang terkendala dalam bidang ekonomi. Jenis bantuan beasiswa yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah PIP (Program Indonesia Pintar) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Untuk bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dikhususkan pada peserta didik yang kurang mampu dan pemegang kartu bantuan dari pemerintah. Bantuan PIP

(Program Indonesia Pintar) merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan menggunakan APBN, kemudian untuk SLB data siswa yang layak menerima bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) merupakan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sipintar, namun sebelumnya sudah ditentukan oleh kepala sekolah SLB mengenai status peserta didik yang layak menerima PIP (Program Indonesia Pintar) di Dapodik.<sup>11</sup> Sehingga usulan pertama mengenai peserta didik yang layak untuk mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar) adalah dari kepala sekolah SLB terkait dan kemudian diverifikasi oleh dinas pendidikan, selanjutnya diusulkan oleh dinas pendidikan kepada PUSLAKDIS. Namun meskipun usulan data penerima PIP (Program Indonesia Pintar) dari kepala sekolah dan dinas pendidikan, pemerintah pusat dalam hal ini adalah PUSLAKDIS yang akan menyeleksi lebih lanjut dan memutuskan peserta didik yang layak menerima bantuan PIP (Program Indonesia Pintar).

Bantuan BSM (Bantuan Siswa Miskin) merupakan bantuan yang dikhususkan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan BSM slb di Jawa Tengah diberikan dengan uang tunai. Dalam pendataan peserta didik SLB yang layak mendapatkan bantuan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan kemudian data tersebut diserahkan pada pemerintah pusat untuk dilakukan seleksi. Pendanaan untuk BSM berasal dari APBD, dengan tujuan agar siswa/siswi dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikannya di SLB. Di tahun ini, dana yang dikeluarkan untuk beasiswa BSM (Bantuan Siswa Miskin) di SLB Negeri Jawa Tengah sebesar Rp. 1.920.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan

Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Namun, program bantuan ini hanya dikhususkan untuk peserta didik di SLB Negeri saja sehingga peserta didik di SLB Swasta tidak dapat memperoleh bantuan ini.

Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) hampir sama karena pada dasarnya program PIP merupakan penyempurna dari program BSM. Dari kedua program ini sampai sekarang masih beberapa kali terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan kepada peserta didik karena data yang belum diperbarui dan terkadang yang tidak sinkron. Sehingga dalam realisasinya masih terdapat peserta didik yang tergolong dari keluarga mampu juga mendapatkan bantuan ini. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi dinas pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan pengecekan secara berkala terkait data peserta didik yang layak mendapatkan bantuan baik BSM maupun PIP sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

3. Meningkatkan kualitas Pendidikan  
Meningkatkan kualitas Pendidikan di SLB di Jawa Tengah merupakan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa Tengah dengan salah satu tujuannya yaitu meminimalisir angka putus sekolah di SLB. Peningkatan kualitas Pendidikan yang dilakukan yaitu dengan terus memperbaiki manajemen sekolah, kurikulum sekolah, dan kesiswaan dalam hal keolahragaan. Program peningkatan kualitas Pendidikan di SLB ini dilakukan setiap tahunnya dan sampai saat ini tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan terus meningkatnya kualitas Pendidikan di SLB diharapkan dapat semakin termotivasi untuk sekolah, meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh AKB, meningkatkan keterampilan guru-guru di SLB, serta dapat meningkatkan kesadaran kepada Masyarakat khususnya para orang tua anak berkebutuhan khusus mengenai isu-isu

<sup>11</sup> Puslapdik Kemendikbudristek. 2023. "Bantuan Pendidikan PIP Tahun 2023 Mulai Disalurkan". <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/bantuan->

[pendidikan-pip-tahun-2023-mulai-disalurkan/](#) diakses pada 11 November 2023.

keberagaman dan kebutuhan khusus. Sehingga dengan peningkatan kualitas Pendidikan di SLB dapat menekan angka putus sekolah dengan menciptakan Pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi siswa berkebutuhan khusus.

Program-program diatas merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk meminimalisir angka putus sekolah di SLB. Dari ketiga program yang dilaksanakan secara umum sudah memenuhi target yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi terutama dalam pensosialisasian mengenai adanya program tersebut kepada masyarakat. Dalam program bantuan baik PIP maupun BSM Dinas Pendidikan juga harus lebih teliti dalam memilah data sebelum diserahkan ke pemerintah pusat terkait peserta didik yang tidak mampu, hal ini agar tidak terjadi lagi salah sasaran dalam pemberian bantuan bagi peserta didik yang membutuhkan. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam program USB beberapa kali mengalami kendala karna lamanya persetujuan dari pemerintah pusat mengenai pembangunan unit sekolah baru, sehingga hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat agar lebih cepat dalam merespon keterbutuhan dari pemerintah daerah dalam hal ini yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah.

Secara umum landasan yang digunakan dalam upaya penurunan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 12 tahun yang menjadi latar belakang dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib belajar “Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam penjelasan pasal 15 yang menyebutkan Pendidikan khusus bahwa Pendidikan khusus adalah Pendidikan bagi siswa siswi yang memiliki keeksentrikan atau memiliki kecerdasan luar biasa yang dilaksanakan berupa satuan Pendidikan khusus pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang dimaksudkan perluasan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Landasan lain yang digunakan dalam program penurunan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah merujuk pada UUD 1945 Pasal 31 ayat yang menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dimaksudkan disini setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk aplikasi dari kebijakan tersebut dan diharapkan dapat mengentaskan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Undang-Undang 1945 alinea keempat adalah seluruh rakyat Indonesia berhak atas Pendidikan yang merupakan faktor penting atas keberlangsungan kehidupan berbangsa. Selain itu juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat satu sampai lima yang menjelaskan hak warga negara Indonesia adalah memperoleh Pendidikan dasar, kemudian pemerintah wajib untuk memberikan biaya Pendidikan untuk warga negara Indonesia serta mewujudkan satu Pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dimaksudkan kewajiban sebuah instansi mengadakan sistem Pendidikan nasional di Indonesia serta pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pendidikan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia yang sangat mendasar mulai dari lahir sampai dengan

mati bahkan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus di Indonesia masih belum merata dan hanya berpusat di daerah-daerah tertentu, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.

Faktor-faktor penyebab putus sekolah diantaranya adanya faktor ekonomi dengan keterbatasan biaya keluarga untuk membiayai segala kebutuhan selama masa pendidikan, faktor jarak tempuh yang jauh menjadi pertimbangan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke jenjang pendidikan, Figur orang tua juga penting guna masa tumbuh kembang anak, faktor lingkungan dimana masyarakat beranggapan bahwasanya pendidikan tidak penting bagi anak-anak mereka jika anak-anak mereka juga bisa hidup layak seperti anak yang berpendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki program dalam menekan angka putus sekolah terkhusus SLB di Jawa Tengah, yaitu dengan program pembangunan USB (Unit Sekolah baru) yang dihasilkan dari program ini adalah SLB negeri yang tidak memungut biaya peserta didiknya, bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dan bantuan BSM (Bantuan Siswa Miskin) bantuan ini difokuskan guna meminimalkan angka putus sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang terkendala dalam perekonomian, meningkatkan kualitas pendidikan di SLB guna menekan angka putus sekolah dan menciptakan pendidikan yang mendukung potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Dari ketiga program yang dilaksanakan secara umum sudah memenuhi target yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi terutama dalam pensosialisasian mengenai adanya program tersebut kepada masyarakat.

Landasan-landasan yang digunakan dalam program penurunan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008

tentang Wajib Belajar 12 tahun, Undang - Undang 1945 alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Bagong Suyanton dan Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Zainudin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Homes. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Ahmad, S. N. (2011). *Pendidikan dan Masyarakat*. Sabda.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

### **Jurnal**

- Wassahua, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Al - i l t i z a m*, 1(2).
- Sirait, R. (2019). Pengaruh Jarak ke Sekolah Terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia. *Jurnal Budget*, 4(1).
- Badasyari, I. (2022). Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(2).
- Fattah, N. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Bandung : PT Remaja Rosdakarya*.
- Morin, B. P. A. S. F. (2017). Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus

Sekolah Di Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Maharani, P. W. (2023). *Pengurangan Angka Putus Sekolah Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Walinagari Di kenagarian Tabel Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

### **Website**

Maulipaksi, D. (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>. Diakses pada 11 November 2023.

Jatnika, Y. (2023). *Bantuan Pendidikan PIP Tahun 2023 Mulai Disalurkan*. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/bantuan-pendidikan-pip-tahun-2023-mulai-disalurkan/>. Diakses pada 11 November 2023.